

Implementasi Kebijakan Turisme Berkesinambungan di Kabupaten Banyuwangi Periode 2010-2021 dan Periode 2021-2024

Kansul Fikri Syah¹, Isbandi Rukminto Adi²

^{1,2}Universitas Indonesia

ismi.kanzulfikri@gmail.com¹, adi1126@yahoo.com²

ABSTRACT

Banyuwangi Regency is considered successful in implementing sustainable tourism policies, as evidenced by the many awards and the designation of Banyuwangi as part of the global geopark chain known as Ijen UNESCO Global Geopark. This cannot be separated from natural potential, rich flora and fauna, cultural diversity and geographical location as well as the commitment of local governments in implementing these policies. Then what becomes interesting is when there is a change of government, whether the implementation of sustainable tourism policies continues or whether there are changes such as differences and similarities between the two periods. The research method uses a descriptive qualitative approach, while data collection is through related documents, non-partisan observation, and in-depth interviews with 16 informants. The results of the research are that there are differences in the implementation of sustainable tourism policies, in the period 2010 to 2021 prioritizing development through tourism instruments for local economic development and creating social welfare, and in the period 2021 to 2024 using instruments to strengthen the local economy with micro and small business policies and medium to generate economic capital in the community during and after the Covid-19 pandemic, but without abandoning the implementation of sustainable tourism policies.

Keywords: *sustainable tourism; policy implementation; local government; local economic development*

ABSTRAK

Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil mengimplementasikan kebijakan turisme berkesinambungan, dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dan ditetapkannya Banyuwangi sebagai bagian rantai geopark global yang dikenal dengan Ijen UNESCO Global Geopark. Hal ini tidak lepas dari potensi alam, kekayaan flora dan fauna, keragaman budaya, dan letak geografis serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Lalu yang menjadi menarik adalah ketika terjadi pergantian pemerintahan, apakah implementasi kebijakan turisme berkesinambungan dilanjutkan atau apakah ada perubahan seperti perbedaan dan persamaan antara kedua periode tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pengumpulan data melalui mode dokumen terkait, observasi nonpartisan, dan wawancara secara mendalam sebanyak 16 informan. Hasil dari penelitiannya adalah terjadi adanya perbedaan atas implementasi kebijakan turisme berkesinambungan, pada periode 2010 sampai 2021 lebih memprioritaskan pembangunan melalui instrumen turisme untuk pembangunan ekonomi lokal serta dalam menciptakan kesejahteraan sosial, dan periode 2021 sampai 2024 menggunakan instrumen penguatan ekonomi lokal dengan kebijakan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membangkitkan kapital ekonomi masyarakat saat dan pasca pandemi Covid-19, namun tidak meninggalkan implementasi dari kebijakan turisme berkesinambungan.

Kata kunci: turisme berkesinambungan; implementasi kebijakan; pemerintah daerah; pengembangan ekonomi lokal

PENDAHULUAN

Tujuan dari kesejahteraan sosial (*social welfare*) ialah untuk memenuhi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi atas semua individu dalam suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial mengarah kepada meningkatnya fungsi sosial di tiap kelompok umur termasuk yang miskin maupun yang kaya sekalipun (Zastrow, 2010, p. 2), selain itu menurut pandangan Adi (2009, p. 5) kesejahteraan sosial juga merujuk pada kondisi tatanan kehidupan yang memadai di tingkat masyarakat dengan cakupan yang menyeluruh meliputi kecukupan material, spiritual, hingga sosial. Tentu saja, kondisi kesejahteraan sosial menjadi harapan bagi hajat banyak orang di tengah pesatnya pembangunan demi pertumbuhan ekonomi, namun tidak melihat aspek lain dan upaya pembangunan yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan sosial.

Nyatanya pembangunan malah berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial, malah sebaliknya, yaitu dorongan peningkatan ekonomi tanpa belas kasih dan meninggalkan aspek pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi (Midgley, 1995, p. 76) seperti menghabiskan sumber daya alam yang telah langka, menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan hidup secara permanen, merusak alam yang pada akhirnya menciptakan kemiskinan. Untuk mengatasi itu semua, maka dikeluarkanlah laporan Our Common Future 1987 oleh The World Commission on Environmental and Development (WCED) tentang arahan pembangunan yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan dengan harapan apa yang ada pada saat ini dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, istilah ini lalu dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Candela dan Figini (2012, p. 555) pembangunan berkelanjutan mengarah pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan serta tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan oleh para ahli dengan disesuaikan pada tiap-tiap wilayah dan dapat diterapkan terhadap situasi geografis tertentu seperti pembangunan turisme berkesinambungan (Candela & Figini, 2012, p. 557). Turisme berkesinambungan (*sustainable turisme*) merupakan aktivitas pariwisata yang layak secara pendapat ekonomi, namun tidak merusak sumber daya alam yang akan menjadi sandaran hidup generasi masa depan, khususnya lingkungan fisik dan tatanan sosial masyarakat selaku tuan rumahnya (Swarbrooke, 1999, p. 13). Ada tiga hal yang menjadi kata kunci turisme berkesinambungan, yaitu berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan, dan berkelanjutan secara sosial yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan sosial serta memberikan manfaat secara luas kepada komunitas lokal selaku tuan rumahnya (Poudel, 2016, p. 3).

Namun untuk mewujudkannya diperlukan suatu implementasi kebijakan, mengingat kebijakan turisme berkesinambungan membutuhkan peraturan yang sifatnya jangka panjang, di mana pembuat kebijakan yang secara langsung memengaruhi terhadap aktivitas turisme dalam jangka panjang termasuk pada aktivitas sehari-hari di suatu destinasi (Goeldner & Ritchie, 2012, p. 327). Selain itu juga dirancang untuk memberikan arahan bagi aktor terkait (Edgell & Swanson, 2019, p. 243). Ada enam aktor terkait yang harus diarahkan dan terlibat langsung terhadap aktivitas turisme berkesinambungan yaitu aktor; (1) pemerintah, (2) industri pariwisata, (3) organisasi sukarela, (4) komunitas lokal, (5), media, dan (6) wisatawan itu sendiri (Swarbrooke, 1999, p. 85). Dari keenam aktor tersebut juga harus diimplementasikan dengan kebijakan jangka panjang (istilah lain; rancangan induk, rencana strategis atau *masterplan*) dan harus melibatkan aktor terkait untuk melakukan kerja sama (Oohlala, 2013, p. 3) dalam mendukung keberlanjutan dari kebijakan turisme berkesinambungan.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, termasuk Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai acuan terhadap pemerintah baik di tingkat kabupaten atau kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan turisme yang lebih berkesinambungan.

Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, salah satu kabupaten di Indonesia yang dinilai berhasil menerapkan implementasi kebijakan turisme berkesinambungan adalah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan Banyuwangi memiliki keragaman budaya, kekayaan flora dan fauna serta posisi geografis yang dikelilingi oleh alam; sebelah Timur ada laut Selat Bali dan Taman Nasional Alas Purwo, sebelah Utara ada Taman Nasional Baluran, sebelah Barat ada Ijen dan sebelah Selatan ada Taman Nasional Meru Betiri (BPS, 2023). Banyak penghargaan yang telah diperoleh Kabupaten Banyuwangi mulai dari penghargaan tingkat provinsi hingga internasional, seperti Penghargaan Nirwan Tantara 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Diskominfo Jatim, 2023), penghargaan dari Asean Tourism Standar 2023 kategori *Community Based Tourism* (Banyuwangitourism, 2023), dan Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UUG) atau dikenal dengan Ijen UNESCO Global Geopark (Banyuwangitourism, 2023) yang secara otomatis menjadi bagian dari jaringan *geopark* global dengan acuan standar turisme berkesinambungan (Fennell & Cooper, 2020, p. 293) dan beberapa penghargaan lainnya.

Banyaknya penghargaan, didukung oleh potensi geografis, di sisi yang lain kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi periode 2010-2021 telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (RIPKKB) yang berorientasi pada ekosistem pembangunan turisme berkesinambungan atau ekowisata. Dengan Perda tersebut diharapkan agar menciptakan lingkungan

kepariwisataan yang memungkinkan untuk dapat dinikmati dampak positifnya baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan.

Konsep ekowisata atau turisme berkesinambungan tersebut dinilai telah sesuai dengan potensi wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Perda RIPKKB tahun 2012 tersebut merupakan peraturan yang sifatnya jangka panjang yaitu berlaku selama dua puluh tahun ke depan sejak ditetapkan (2012) sampai tahun 2031 dengan bunyi; *“Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam (5) lima tahun”* atau ketika ada pergantian periodisasi kepemimpinan dan menjadi acuan payung hukum dari semua kebijakan institusi lembaga pelaksana di Kabupaten Banyuwangi.

Menyikapi Perda RIPKKB tahun 2012, selaras dengan pandangan ahli agar turisme bergerak ke arah yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan pengelolaan ekosistem turisme berkesinambungan, diperlukan pedoman, perencanaan, atau aturan kebijakan yang sifatnya jangka panjang, dan dibutuhkan kepemimpinan yang baik serta strategi yang efektif jika masa depan turisme berkesinambungan ingin lebih berkembang dan terus berlanjut – jika tidak, kemajuan menuju keberlanjutan akan terbatas pada pendekatan serampangan dan tidak memiliki serangkaian tujuan yang terus berlanjut (Edgell & Swanson, 2019, p. 244). Artinya jika tidak menggunakan kebijakan yang sifatnya jangka panjang, maka turisme berkesinambungan tidak dikatakan turisme yang berlanjut atau berkelanjutan, akan tetapi menjadi turisme seperti biasanya yaitu tidak berkesinambungan atau tidak berlanjut. Juga menurut Ismet dan Abuhjeeleh (2016, p. 12), sering kali membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lama untuk memastikan kebijakan turisme terus berkelanjutan.

Namun, setelah Pemda Kabupaten Banyuwangi periode 2010-2021 selesai dan beralih ke pada Pemda periode 2021-2024 atau sampai sekarang (Fanani, 2021). Lantas seperti apa implementasi kebijakan turisme berkesinambungan, “apakah kebijakannya dilanjutkan atau apakah kebijakan turisme berkesinambungan kemungkinan ada perbedaan atau kesamaan dari keduanya”. Mengingat, (1) Bupati periode 2021-2024 memiliki relasi dengan tanda petik ada hubungan kekeluargaan dengan bupati periode 2010-2021 (MK, 2021, p.10-11) tidak berlebihan jika berasumsi – kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan atau ada persamaan. Lalu (2) perlu dilihat apakah aktor-aktor terkait, situasi, momentumnya, institusi apakah berbeda dari periode sebelumnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perubahan atau adanya perbedaan atas implementasi kebijakan kedua periode tersebut, tidak berlebihan jika berasumsi – kebijakan tersebut akan ada pola yang berbeda.

Menurut pandangan Barquero (2002, p. 96) keterkaitan antara pembangunan dan kepercayaan (keluarga, teman, dan kekasih) memiliki hubungan yang kuat, di mana suatu hubungan yang terjalin dengan kerja sama, cenderung tidak akan ada pertentangan dalam proses implementasi suatu kebijakan. karena jika institusi dibangun dalam hubungan kekeluargaan, apalagi ada rasa kepercayaan yang

mengakar, maka akan menghilangkan perbedaan dan akan mengalahkan sistem struktur sosial. Akan tetapi meskipun implementasi kebijakan turisme berkesinambungan dilanjutkan, namun pasti ada perbedaan, menurut Guo (2019, p. 10) terdapat perbedaan dalam tujuan kebijakan, jalur pembangunan dalam kondisi institusi pemerintahan yang berbeda, misalnya siapa yang memimpin pembangunan, siapa yang mengimplementasikan kebijakan, struktur institusi, masyarakat, momentum, berjalannya waktu, dan lainnya. Maka implementasi dari kebijakan turisme berkesinambungan akan ada pola yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, tentu yang menjadi menarik ketika Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil dalam membangun, mengembangkan serta mengimplementasikan kebijakan turisme berkesinambungan, dibuktikan dengan dikeluarkannya Perda RIPKKB tahun 2012 yang menjadi payung hukum semua kebijakan, Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai jaringan *geopark* global atau Ijen UNESCO Global Geopark, mendapatkan banyak penghargaan, meningkatnya angka kunjungan wisatawan pada awal tahun 2000-an sebanyak 31,02 ribu orang dan terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2019 menyentuh angka 5,4 juta wisatawan (lihat gambar di bawah).

Namun ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pemerintahan atau rezim dari Pemda periode 2010-2021 ke Pemda periode 2021-2024, lantas apakah ada perubahan seperti perbedaan dan persamaan dari implementasi kebijakan turisme berkesinambungan. Hal ini kemudian dimunculkan dan menjadi arah pada penulisan jurnal ini yaitu; apakah ada pergeseran atau perubahan dari implementasi kebijakan turisme di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2010-2021 dan periode 2021-2024 ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pemerintahan atau rezim. Sehingga tujuannya, diharapkan dapat mendeskripsikan perubahan seperti perbedaan dan persamaan atau adanya pergeseran atas implementasi kebijakan turisme berkesinambungan di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2010-2021 dan periode 2021-2024 ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pemerintahan atau rezim. Adapun kebaruannya (*novelty*) terletak pada adanya perubahan dari implementasi kebijakan turisme berkesinambungan di Kabupaten Banyuwangi pada periodisasinya yang diperdalam melalui sudut pandang kesejahteraan sosial, tentu periodisasi melalui kacamata kesejahteraan sosial untuk mempertegas atas kebaruan atas jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan jenis tujuan penelitian kualitatif deskriptif (*descriptive qualitative*) (Creswell, 1994, p. 2), mengingat kualitatif deskriptif memiliki upaya untuk memberikan gambaran penelitian secara rinci, menggunakan kata-kata atau angka, menyajikan profil atau personal, klasifikasi dari jenis, atau pun secara garis besar langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana (Neuman, 2014, p. 38). Adapun pemilihan informan yaitu menggunakan strategi teknik *nonprobability sampling*

dengan tipe *purposive sampling* guna memperoleh informan yang relevan terhadap konteks penelitian (Bryman, 2012, p. 218). Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang terkait, observasi non partisipan (*non-participant observation*), dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) yang mengarah kepada wawancara semi terstruktur (*unstructured interview*) (Bryman, 2012). Adapun teknik peningkatan kualitas penelitian menggunakan Krefting (1991, p. 217) yang disaring menjadi empat penekanan yaitu; strategi kredibilitas (*credibility strategies*), strategi transferabilitas (*transferability strategies*), strategi dependabilitas (*dependability strategies*), dan strategi konfirmabilitas (*confirmability strategies*).

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu dari Bulai Mei sampai September 2024 dengan lokasi penelitian yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi. Ada 16 informan yang terbagi dalam 6 aktor dengan merujuk pada Swarbrooke (1999, p. 85), yaitu perwakilan dari; (1) pemerintah, (2) industri pariwisata, (3) organisasi relawan, (4) komunitas lokal, (5) media, dan (6) wisatawan. Adapun aktor pemerintah diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kelurahan Kalipuro, Ijen UNESCO Global Geopark (Ijen UGG), dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Perum Perhutani Banyuwangi Selatan. Untuk industri pariwisata diwakili oleh agen travel dan homestay. Adapun organisasi relawan diwakili oleh Asosiasi Kelompok Sadar Wisata Pariwisata (Pokdarwis) Kabupaten Banyuwangi dan Pelaku Pariwisata (P2B) Banyuwangi, dan Komunitas Kampung Batara. Untuk komunitas lokal diwakili oleh Pokdarwis Gombengsari, adapun aktor media diwakili oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi dan Radio Mandala FM serta unsur perwakilan wisatawan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periodisasi 2010-2021 dan 2021-2024 atas implementasi kebijakan turisme berkesinambungan di Kabupaten Banyuwangi akan dibahas menggunakan kerangka konsep implementasi (*a conceptual framework of the implementation process*) dari Mazmanian dan Sabatier (1983, p. 22) yang diolah serta dilakukan penyesuaian sehingga menjadi tiga tahap proses yaitu; solvabilitas dari masalah (*tractability of the problem*), kemampuan menstrukturkan kebijakan agar terimplementasi (*ability of policy decision to structure implementation*), dan variabel di luar pembuat kebijakan yang memengaruhi agar terimplementasi (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Solvabilitas dari Masalah

Kondisi sebelumnya, Banyuwangi dinilai kabupaten yang terbelakang, kebijakan turisme tidak berkesinambungan, tidak menjadi unggulan dalam pembangunan meskipun secara prasyarat, potensi, dan letak geografis sangat mendukung terhadap terciptanya ekosistem turisme berkesinambungan yang mengedepankan konservasi alam, keunggulan budaya lokal, dan keragaman sosial (Renstra Menparekraf, 2020, p. 28). Kesulitan teknis lainnya adalah beragamnya masyarakat dengan populasi penduduk 1,7 juta penduduk, 7 etnis, dan pemeluk

agama yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan cara untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi dan misi antara masyarakat terhadap kebijakan turisme berkesinambungan yang dinilai baru. Lalu sejak berjalannya dua sampai tiga tahun kebijakan turisme berkesinambungan, terjadinya ego sektoral antara aktor turisme kaitannya dengan lahan pengelolaan destinasi dan beberapa penolakan lainnya yang dilakukan antara pelaku budayawan dan tokoh agamawan (kiai atau ustaz), serta beberapa kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan turisme yang dinilai bertentangan dengan prinsip agama. Oleh karenanya Pemda Kabupaten Banyuwangi periode 2010-2021 melakukan pemetaan, penggambaran, dan belanja masalah terhadap masalah sosial (*social problems*) maupun permasalahan sosial nonsosial (Mazmanian dan Sabatier, 1983, p. 23).

Masuk pada periode selanjutnya, kesulitan teknis kaitannya dengan faktor sosial pada periode 2021 sampai 2024 relatif lebih mudah teratasi dikarenakan belanja masalah dan pemataannya telah direncanakan pada periode sebelumnya. Beberapa kebijakan telah dibangun akhirnya menciptakan fondasi yang kokoh, sehingga kaitannya dengan problem sosial terbilang tidak ada kesulitan. Namun ada faktor yang sifatnya nonsosial lain yaitu permasalahan pandemi Covid-19 yang relatif lebih sulit untuk diatasi dari pada masalah sosial lainnya. Dan pasca pandemi (*new-normal*) menjadi kesulitan teknis tersendiri yang mengharuskan Pemda lebih fokus terhadap pertahanan dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang merosot, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) belum penuh sepenuhnya sehingga beberapa even turisme harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi keuangan yang minim, ditambah dengan kondisi penerbangan pesawat jenis *airline* mengalami penurunan sehingga menyebabkan harga tiket yang terbilang mahal – yang pada akhirnya menyebabkan angka kunjungan wisatawan menurun secara tajam dan aspek pandemi berakibat pada kemampuan menstrukturkan implementasi kebijakan turisme berkesinambungan secara signifikan pada periode 2021-2024.

Kemampuan Menstrukturkan Kebijakan agar Terimplementasi

Sejak dikeluarkan dan disahkannya Perda RIPKKB per tanggal 3 Desember 2012, kebijakan turisme berkesinambungan menjadi payung hukum atas semua institusi lembaga pelaksana di Pemda Kabupaten Banyuwangi dengan istilah yang terkenal yaitu, 'semua dinas adalah dinas pariwisata' serta 'semua kegiatan adalah atraksi dan semua tempat adalah destinasi', turisme sebagai instrumen untuk pembangunan di Kabupaten Banyuwangi khususnya terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemda dalam mendukung kebijakan turisme berkesinambungan yaitu dengan melakukan beberapa penguatan terhadap kapital ekonomi seperti melakukan berbagai inovasi misalnya dengan menggelar even tahunan yang dikenal dengan Banyuwangi Festival (B-FEST), melakukan promosi secara besar-besaran dibuktikan dengan pengalokasian sumber daya keuangannya untuk mempromosikan Ijen sebagai ikon Banyuwangi dengan berbagai

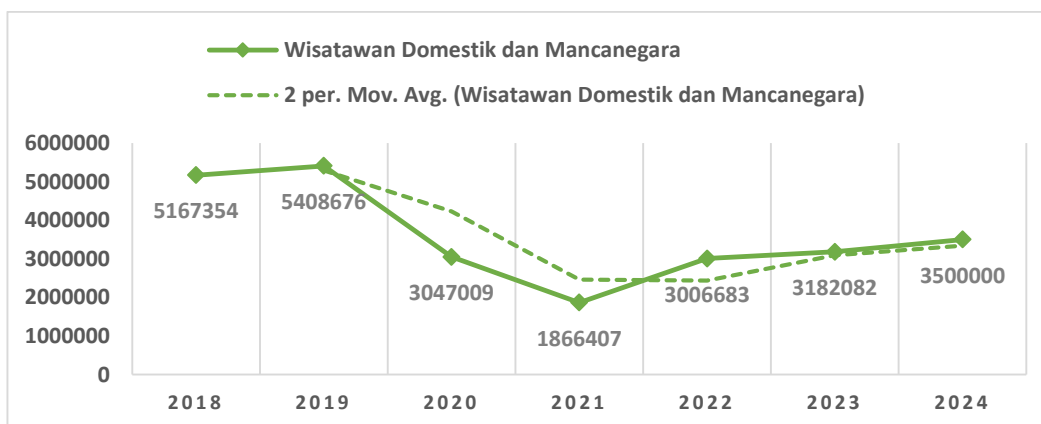
gelaran rutin even baik nasional hingga internasional, misal *Internasional Tour de Ijen*, dan even lainnya. Lalu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Banyuwangi mengharuskan untuk menyinkronkan antara nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat lalu diselaraskan untuk ditampilkan menjadi atraksi turisme sehingga bisa dinikmati oleh banyak wisatawan yang datang, seperti Tari Gandrung, Tari Seblang Olehsari, tradisi Kebo-Keboan, dan lainnya. Di sisi lain Pemda juga melakukan penguatan human kapital terhadap sumber daya manusia (SDM) para aktor atau pelaku usaha turisme seperti melakukan beberapa pelatihan guna menunjang kebijakan tersebut.

Hal lainnya juga, Pemda turut melakukan penguatan model fisik terhadap peningkatan aksesibilitas jalan dengan istilah 'segitiga emas' yaitu; memperbaiki sepanjang jalan menuju Kawasan Ijen, menuju Taman Nasional Alas Purwo, dan rute menuju Kawasan Pantai Pelengkung. Dikarenakan rute menuju ketiga kawasan tersebut akan dilalui oleh berbagai titik-titik destinasi turisme yang ada di Kabupaten Banyuwangi, pembangunan jaringan infrastruktur lainnya adalah, membangun jaringan fiber optik untuk mendukung konektivitas dari internet. Pemda juga melakukan beberapa integrasi hierarkis kebijakan antar lembaga pelaksana terhadap Perhutani KPH Banyuwangi, baik wilayah Selatan, Barat, dan Timur. Mengingat hampir 50 persen lebih lahan destinasi turisme yang sifatnya alam dan potensi destinasi yang sifatnya rintisan ada di bawah otoritas Perhutani. Integrasi lainnya juga dilakukan terhadap Ijen UGG, mengingat Ijen UGG diberikan wewenang oleh pemerintah nasional dan organisasi dunia yang secara khusus untuk tetap menjaga beberapa titik-titik aset alam dan beberapa tugas lainnya secara umum, untuk menjaga keberlangsungan agar tetap berkesinambungan di seluruh Kabupaten Banyuwangi – jika hal tersebut dilanggar maka status dari Ijen UGG akan dicabut oleh UNESCO, karena sudah tidak lagi menjadi bagian dari rantai global *geopark* dunia (Fennell & Cooper, 2020, p. 293).

Bentuk kebijakan lainnya terhadap aktor turisme adalah penguncian dan pemagaran terhadap pembangunan hotel di pinggir pantai, pelarangan pembangunan hotel bintang tiga ke bawah atau kelas melati dengan harapan untuk menciptakan ruang daya saing dan menumbuhkan homestay, serta sebagai bentuk keberpihakan Pemda terhadap ekonomi masyarakat lokal selaku tuan rumah turisme. Upaya lainnya juga melakukan penguatan terhadap agen travel dan melibatkan aktor turisme untuk melakukan promosi agar mengundang dan mendatangkan wisatawan dari laur daerah. Beragamnya spesifikasi aktor turisme, Pemda Kabupaten Banyuwangi juga turut serta melibatkan aktor turisme untuk menyerap dan menampung berbagai masukan, ide, melakukan kerja sama, merumuskan suatu kebijakan guna menjadi bahan dan diprogramkan dalam bentuk kegiatan untuk mendukung keberlanjutan dari implementasi kebijakan turisme berkesinambungan. Semua kebijakan tersebut diharapkan untuk penguatan ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Adapun pada periode 2021-2024, dilantik dan dimulainya Pemda baru pada awal periode 2021, Banyuwangi termasuk dunia internasional memasuki masa pandemi. Kebijakan turisme tidak optimal di tengah berlangsungnya pandemi, oleh

karenanya kebijakan harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi pada saat itu, antara lain jalan-jalan virtual melalui *Google Earth*, membuat program atraksi di dalam ruangan seperti di dalam hotel agar tidak terjadi kerumunan dan berpotensi menciptakan sebaran baru Covid-19. Di sisi yang lain Pemda juga memberikan dukungan terhadap para pelaku budaya, pemusik, dan aktor kreatif lain dalam memberikan bantuan insentif dana agar tetap melakukan aktivitas atraksi turisme dengan harapan wisatawan tetap berkunjung ke Banyuwangi, menghidupkan para pelaku turisme, serta okupasi penginapan agar tetap terjaga. Lalu pada pasca pandemi Pemda mewajibkan sekolah-sekolah untuk kembali berwisata di beberapa destinasi dengan tujuan untuk memulihkan aktivitas turisme dan perekonomian pasca pandemi, oleh karenanya fokus utama dari kebijakan periode 2021 sampai 2024 adalah penguatan kapital ekonomi. Konkretnya penguatan kapital ekonomi adalah, Pemda melakukan penguatan terhadap usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau yang kenal dengan UMKM Naik Kelas. Kebijakan tersebut dibuat untuk pertahanan dan memulihkan perekonomian khususnya masyarakat menengah ke bawah, dengan dibantu baik dari segi sumber daya keuangan maupun bantuan model fisik seperti bantuan gerobak, kompor, blender, dan lainnya sebagai jaring sosial. Guna mendukung program UMKM Naik Kelas, Pemda mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli hasil produk pelaku usaha UMKM dan pasar-pasar tradisional, serta masyarakat umum diharuskan juga untuk berbelanja produk UMKM guna dapat menggerakkan perputaran ekonomi di Kabupaten Banyuwangi agar pulih kembali.



Gambar 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara pada Tahun 2018 sampai Tahun 2024

Sumber: Hasil olah penelitian, Agustus 2024

Pada gambar di atas, terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang cukup runcing dan signifikan pada periode 2021 yaitu sebanyak 1,8 jutaan kunjungan dan berbeda jauh pada tahun 2020 sampai 2018, sehingga kebijakan turisme tidak optimal dan tidak menjadi yang utama seperti pada periode sebelumnya, di mana kunjungan wisatawan cukup tinggi di angka 5,4 jutaan. Kondisi pandemi juga

berpengaruh pada alokasi sumber daya keuangan, Pemda melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi keuangan yang terbatas, sehingga aktivitas dari turisme tidak menjadi perhatian utama dan pemulihan kapital ekonomi seperti program UMKM Naik Kelas yang menjadi prioritas utama pada periode 2021-2024.

Variabel di Luar Pembuat Kebijakan yang Memengaruhi Implementasi

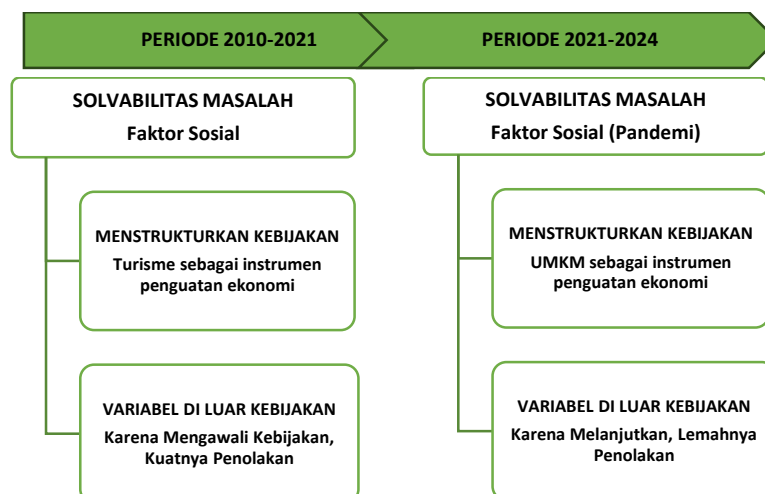
Pada aspek ini masyarakat mendukung karena Pemda telah melakukan penguatan terhadap human kapital, berupa peningkatan kualitas SDM, sosialisasi hingga ke level bawah, dan kebijakan turisme berkesinambungan dinilai memberikan dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat secara umum, seperti adanya pengurangan angka kemiskinan pada tahun 2010 kisaran angka 20 persen dan turun menjadi 6,6 persen pada tahun 2019. Bentuk dukungan lainnya juga datang dari pemerintah pusat termasuk pada tingkat kementerian hingga perusahaan negara seperti memberikan bantuan *corporate social responsibility* (CSR). Dukungan dari masyarakat dan pemerintah pusat tidak terlepas hal dari komitmen dan keterampilan dalam kepemimpinan periode 2010 sampai 2021 dalam mewujudkan dan mendukung ekosistem kebijakan turisme berkesinambungan agar terus berlanjut.

Dari kebijakan turisme berkesinambungan pada periode 2010 sampai 2021, menciptakan kesejahteraan sosial pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya industri turisme yang meliputi; munculnya para pelaku usaha turisme, terciptanya destinasi baru, berkembangnya homestay, pusat oleh-oleh hingga adanya hilirisasi barang mentah menjadi setengah jadi atau jadi seperti penjualan biji kopi yang beralih menjadi penjualan kopi di kafe-kafe. Aspek lainnya juga munculnya para pengusaha turisme sehingga menyerap banyak lapangan pekerjaan dan adanya penggeseran nilai budaya menjadi atraksi turisme.

Masuk pada periode 2021-2024, secara umum pada masa pandemi mengharuskan masyarakat beraktivitas via teknologi dan berdampak terhadap masifnya pengguna media sosial. Sedangkan dalam konteks Banyuwangi, pembangunan jaringan fiber optik yang merata hingga ke pelosok desa pada periode sebelumnya, membuat pemilik destinasi wisata memanfaatkan peluang teknologi tersebut, yaitu dengan melakukan promosi melalui jaringan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan di sisi yang lain media umum juga ikut serta membantu mempromosikan destinasi wisata yang ada di Banyuwangi seperti BWI24JAM, Ekspolorsbanyuwangi, dan lainnya sehingga berdampak terhadap terkenalnya beberapa destinasi wisata serta menyebar dan ramai diperbincangkan oleh khalayak umum di media sosial, istilah lainnya adalah *viral*. Kaitannya dengan dukungan publik, sudah tidak ada lagi penolakan terhadap aktivitas turisme yang dinilai bertentangan dengan nilai ajaran agama, karena sudah tersosialisasi kepada semua kalangan sehingga menurunkan penolakan seperti pada periode sebelumnya, dan turisme berkesinambungan dinilai bermanfaat secara positif terhadap masyarakat umum. Namun ada problematik lain di luar penolakan turisme yang

sempat ramai pada awal periode 2021, yaitu masyarakat Banyuwangi mengkritisi langkah kebijakan Pemda tentang sengketa lahan Kawah Ijen antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, lalu dengan cepat Pemda menyampaikan dengan baik dan informasi secara utuh kepada semua masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Pemda pulih kembali.

Meskipun Pemda tidak memprioritaskan pembangunan kebijakan turisme dan lebih kepada penguatan kapital ekonomi pada saat dan pasca pandemi. Namun, dalam aspek dukungan penguasa, kunjungan Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali ke Kabupaten Banyuwangi, oleh banyak kalangan dan ahli kebijakan, kunjungan tersebut dinilai menjadi simbol bahwa Banyuwangi sebagai kabupaten yang paling siap menghadapi aktivitas turisme di masa pasca pandemi (*new-normal*) dan Banyuwangi dinilai merupakan kabupaten tercepat dalam pemulihan ekonomi. Dukungan lainnya datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggris. Kedua revitalisasi tersebut oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat diilustrasikan bahwa adanya dukungan penguasa dalam hal ini pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi yaitu revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan aspek turisme seperti revitalisasi Asrama Inggris, yaitu pemulihan bangunan bersejarah sebagai destinasi turisme baru. Bentuk dukungan penguasa tidak lepas dari komitmen dan keterampilan kepemimpinan Pemda dalam membangun penguatan ekonomi kapital saat dan pasca pandemi yaitu UMKM. Di bawah ini merupakan gambaran adanya perubahan atas implementasi kebijakan turisme berkesinambungan pada kedua periode.



Gambar 2: Perubahan Implementasi Kebijakan Turisme Berkesinambungan Periode 2010-2021 dan Periode 2021-2024

Sumber: Hasil olah penelitian, November 2024

Analisis Perubahan Implementasi Kebijakan Turisme Berkesinambungan

Perubahan atas implementasi kebijakan turisme berkesinambungan yang paling menonjol, yaitu masalah faktor sosial dan faktor non sosial seperti pandemi di

mana jalan keluar atau solvabilitas membutuhkan teknologi dan pembiayaan yang tidak murah (Mazmanian & Sabatier, 1983, p. 23), sehingga berefek pada adanya perubahan terhadap kemampuan menstrukturkan kebijakan. Kedua, periode 2010-2021 menggunakan turisme sebagai instrumen pembangunan ekonomi khususnya pengembangan ekonomi lokal dan periode selanjutnya kebijakan UMKM sebagai instrumen kebijakan dikarenakan pandemi. Ketiga, pada periode 2010-2021 karena mengawali suatu kebijakan yang terbilang baru maka terjadi kuatnya penolakan dan periode 2021-2024 karena melanjutkan kebijakan periode sebelumnya maka terjadi pelemahan terhadap kritikan penolakan. Di mana ketiga kondisi tersebut mempengaruhi atas adanya perbedaan secara beruntun kebijakan bentuk turunan lain (Mazmanian & Sabatier, 1983, p. 21) terhadap implementasi kebijakan turisme berkesinambungan atas kedua periode. Adapun analisis perubahannya sebagai berikut.

Pertama, kaitannya dengan solvabilitas dari masalah pada kedua periode terjadi perubahan atas kesulitan teknis (*technical difficulties*). Periode 2010-2021, kesulitan teknisnya lebih kepada faktor sosial misalnya terkait dengan proses penyamaan persepsi antara pelaku budaya dan kelompok agamawan dan periode 2021-2024 kesulitan teknisnya lebih kepada faktor non sosial seperti pandemi. Oleh karenanya kesulitan teknis kaitannya dengan faktor non sosial, menurut Mazmanian dan Sabatier (1983, p. 23) relatif lebih sulit untuk teratasi dibandingkan faktor yang sifatnya sosial, di antaranya alat atau teknologi belum memadai untuk mencari solusi, membutuhkan pembiayaan keuangan yang begitu mahal (pandemi), dan seterusnya. Lalu terjadi perubahan pada keberagaman kelompok sasaran (*diversity of proscribed behavior*) yang diatur, periode 2010-2021 mengarah pada kuatnya penolakan dan ego sektoral antara aktor kaitannya dengan pengelolaan destinasi turisme, adapun periode 2021-2024 terjadi pelemahan atau penurunan atas keduanya dikarenakan pada periode sebelumnya sudah dilakukan belanja masalah atau pemetaan terhadap solvabilitas dari masalah. Meskipun masing-masing variabel merupakan hal yang terpisah, variabel tersebut dapat digabungkan, setidaknya secara konseptual dan menjadi indeks ringkasan kutraluran solvabilitas masalah yang melekat (Mazmanian & Sabatier, 1983, p. 21), pada akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kemampuan menstrukturkan kebijakan agar terimplementasi.

Kedua, perihal kemampuan menstrukturkan kebijakan agar terimplementasi kedua periode terjadi perubahan atas kebijakan (*precision and clear ranking of legal objectives*). Periode 2010-2021 menerapkan kebijakan turisme sebagai instrumen kapital ekonomi dengan melakukan berbagai inovasi, promosi, menyelaraskan keragaman budaya menjadi atraksi turisme, penguatan human kapital dengan peningkatan SDM aktor turisme, meningkatkan terhadap aksesibilitas jalan, termasuk melakukan penguatan terhadap ekonomi lokal. Instrumen kebijakan turisme tersebut sebagai upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (Candela & Figini, 2012, p. 557). Adapun diperiode 2021-2024, lebih kepada UMKM sebagai instrumen dalam kapital ekonominya mengingat, terjadi kesulitan teknis yaitu pandemi, namun tidak meninggalkan

terhadap kebijakan turisme berkesinambungan yang telah diterapkan pada periode sebelumnya. Kebijakan UMKM lalu dibarengi dengan mengharuskannya Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk berbelanja terhadap produk UMKM, di sisi yang lain juga Pemda menghimbau kepada masyarakat kembali untuk membeli pasar rakyat agar kebijakan tersebut bisa optimal. Oleh karenanya perubahan dari turisme ke UMKM sebagai upaya Pemda (institusi) melakukan inovasi dan penyesuaian, mengingat di masa pandemi perekonomian tidak stabil. Menurut Barquero (2002, p. 108) institusi melakukan inovasi karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayahnya dan keadaan tertentu (pandemi), sehingga perubahan demi perubahan dilakukan untuk memberikan tuntunan baru pada institusi untuk berubah. Hal yang sama juga terjadi perubahan kaitannya dengan alokasi sumber daya keuangan kedua periode (*initial allocation of financial resources*). Periode 2010-2021 memfokuskan terhadap promosi turisme dan periode 2021-2024 tidak memfokuskan terhadap turisme.

Ketiga, analisis perubahan terkait variabel di luar pembuat kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Pada periode 2010-2021 karena mengawali kebijakan yang terbilang baru, maka terjadi adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap aktivitas turisme yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Menurut Swarbrooke (1999, p. 115) penolakan kaitannya dengan etika atau yang berbasiskan agama yang secara khusus peduli dengan dampak negatif sosial dari aktivitas turisme yang bermuatan pada moral, seperti sek bebas, narkoba, dan lain sebagainya – hal tersebut kerap kali terjadi di banyak negara yang berbasiskan agama kuat – mengingat Banyuwangi mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Adapun pada periode 2021-2024 bentuk penolakan sudah terbilang lemah dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda sudah sampai level bawah dan masyarakat secara umum juga merasakan dampaknya terhadap kebijakan turisme berkesinambungan, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, pada masa pandemi, aktivitas masyarakat lebih banyak melalui teknologi, maka menyebabkan promosi destinasi turisme lebih masif lagi khususnya melalui media sosial, menurut Giddens (2002, p. 151) media memiliki peran kunci dalam pengembangan turisme berkesinambungan. Lalu pada aspek komitmen dan keterampilan dalam kepemimpinan lebih banyak mensosialisasikan penguatan ekonomi kepada masyarakat. Adapun persamaannya dari kedua periode tersebut adalah tetap tidak meninggalkan pembangunan kebijakan turisme berkesinambungan meskipun beda secara penekanan atau skala prioritas, dan pemerintah pusat seperti kementerian atau perusahaan nasional, sama-sama mendukung atas kebijakan turisme berkesinambungan sebagaimana pada isi Perda RIPKKB tahun 2012.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Adanya perubahan atau perbedaan pada kedua periode dari implementasi kebijakan turisme berkesinambungan di Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh faktor sosial, yaitu upaya penyamaan persepsi terhadap aktor turisme atau kelompok sasaran yang akan diatur dalam implementasi kebijakan dan faktor non sosial, yaitu pandemi

Covid-19 yang menyebabkan skala prioritas dalam pembangunan turisme. Perbedaan lainnya adalah periode 2010 sampai 2021 memprioritaskan terhadap pembangunan dengan instrumen kebijakan turisme berkesinambungan dan berdampak terhadap penguatan kapital ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan sosial. Sedangkan pada periode 2021 sampai 2024 lebih memprioritaskan terhadap penguatan kapital ekonomi dengan kebijakan UMKM yang berakibat pada menciptakan kesejahteraan sosial, kebijakan tersebut tidak lepas dari faktor pandemi, namun tidak meninggalkan implementasi kebijakan turisme berkesinambungan. Sedangkan persamaannya kedua periode adalah sama-sama mengimplementasi kebijakan turisme berkesinambungan sebagaimana pada Perda RIPKKB tahun 2012 namun dengan instrumen pembangunan yang berbeda untuk menuju pada penciptaan kesejahteraan sosial.

Saran terhadap temuan dari penelitian ini sebagai berikut; setelah pandemi Covid-19 usai, Pemda Kabupaten Banyuwangi harus kembali memprioritaskan terhadap implementasi kebijakan turisme berkesinambungan sebagai instrumen pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, dikarenakan masa pandemi sudah selesai. Selain itu, melihat kondisi Kabupaten Banyuwangi dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan pinggiran hutan, oleh karenanya instrumen pembangunannya harus menggunakan penguatan terhadap turisme dengan tujuan untuk mendatangkan wisatawan dan menumbuhkan para pelaku usaha turisme atau UMKM – yang pada akhirnya menciptakan perputaran dan aktivitas ekonomi. Jika instrumen pembangunannya menggunakan UMKM, sebagaimana yang disampaikan oleh banyak informan dan ahli kebijakan, maka UMKM yang ada di lereng gunung dan di pinggiran hutan tersebut tidak akan laku dikarenakan sepi dan tidak ada wisatawan yang berkunjung – yang pada akhirnya tidak menumbuhkan aktivitas ekonomi.

Kedua, Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada periode 2021 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani layak untuk tetap dilanjutkan sampai periode 2031 dikarenakan implementasi dari kebijakan turisme berkesinambungan menurut pendapat peneliti, sudah sesuai dengan Perda RIPKKB tahun 2012 dengan syarat tetap melindungi dan berpihak terhadap penguatan aktor turisme dan komunitas lokal selaku tuan rumah. Di sisi yang lain agar dapat melanjutkan kebijakan periode sebelumnya (2010-2021) yang belum tergarap secara tuntas, sehingga bisa selesai hingga tahun 2031 sebagaimana pada Perda RIPKKB tahun 2012 yang berlaku sampai tahun 2031.

Ketiga, arah pembangunan turisme berkesinambungan selalu dinamis ke depan sebagaimana arah pembangunan dunia, mulai dari Sustainable Development, Millenium Development Gols (MDGs), dan Sustainable Development Gols (SDGs) yang berlaku sampai tahun 2030. Dan Kabupaten Banyuwangi dinilai memiliki potensi dan prospek tinggi terhadap turisme. Oleh karenanya Pemda Kabupaten Banyuwangi harus melakukan penyesuaian penyesuaian, melakukan diskresi, adaptif, dan inovatif terhadap kebijakan turisme agar tetap seirama dengan perkembangan pembangunan turisme berkelanjutan.

DATAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2009). Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Rajawali Pers.
- Admin. (2023). Bukan Main! Desa Wisata Tamansari Banyuwangi Raih Penghargaan di Ajang Asean Tourism Standar 2023. Disbudpar Banyuwangi pada 8 Februari 2023. *Berita Banyuwangi*. Diakses dari portal Desa Tamansari Banyuwangi Raih Penghargaan di Ajang Asean Tourism Standart 2023 | (banyuwangikab.go.id) pada 3 Agustus 2024.
- Admin. (Mei, 2023). Sah! Hari Ini Geopark Ijen Ditetapkan UNESCO Global Geopark. *Disbudpar Banyuwangi*.
<https://www.banyuwangitourism.com/public/index.php/news/sah-hari-ini-geopark-ijen-ditetapkan-unesco-global-geopark> pada 3 Agustus 2024
- BPS Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka*. Agustus 3, 2024. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2023 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (bps.go.id).
- Bryman, Alan. (2012). *Social Research Methods*. 4th Edition. Oxford University Press.
- Candela, Guido., & Paolo Figini. (2012). *The Economics of Tourism Destinations*. Springer.
- Creswell, Alan. (1994). *Research Design: Quantitative and Qualitative Approac*. Sage Publication.
- Edgell, David, L., & Jason R. Swanson. (2019). *Tourism Policy and Planning Yesterday, Today, and Tomorrow*. Routledge.
- Fennell, David A., & Cooper, Chris. (2020). *Sustainable Tourism Principles, Contexts, and Practices*. Channel View Publications.
- Goeldner, Charles R., & Ritchie, J., R., Brent. (2012). *Tourism Principles, Practices, Philosophies*. John Wiley & Sons.
- Guo, Yi., Jinibo Jiang., & Shengchao LI. (2019). A Sustainable Tourism Policy Research Review. *Journal Sustainability*, 11 (11), 1-26.
- Ismet, E., & Abuhjeeleh, M. (2016) The Analysis of Tourism Policies by Different Governments Potential Implementation in North Cyprus Economy. *Journal of Political Scinces & Public Affairs*, 4 (11), 2-13. A Sustainable Tourism Policy Research Review (mdpi.com)
- Kememparekraf. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024. Rencana Strategis Perubahan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif (kememparekraf.go.id).
- Krefting, L. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworhiness. *American Journal of Occupational Therapy*, 45 (3), 214-222. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2031523/>.
- Kusnadi. (2023). Banyuwangi Raih Penghargaan Nirwasita 2020. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada 17 Juni 2021. Diakses dari portal Server Error (jatimprov.go.id) pada 25 November 2023.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 2716-2731 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.5991

- Mazmanian, D., A., & Sabatier, P., A. (1983). Implementation and Public Policy. Foresmen and Company.
- Midgley, James. (1995). Social Development The Development Perspective in Social Welfare. Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Person Education Limited.
- Oohlala, Reymarie. (2013). Coopertaive Participation in Tourism Planning. Chapter 3. Januari 24, 2024. Chapter 3 | PPT (slideshare.net)
- Poudel, S., Gyan P. Nyaupane, & Megha Budruk. (2014). Stakeholders' Perspectives of Sustianbale Tourism Development: A New Approach to Measuring Outcomes. *Journal of Travel Research*, 55, 1-16. (57) Stakeholders' perspectives of sustainable tourism development: A new approach to measuring outcomes | Surya Poudel and Gyan Nyaupane - Academia.edu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021. Agustus 3, 2024. Access Denied (mkri.id)
- Swarbrooke, John. (1998). Sustainable Tourism Management. CBI Publishing.
- Vazquez-Barquero, Antonio. (2002). Endogenous Development Networking, Innovation, Institutions, and Cities. Routledge.
- Zastrow, Charles. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People (10 ed). Brooks/Cole Cengage Learning.